



Optimalisasi Pelayanan Mitigasi Bencana Banjir di Karangbinangun Lamongan Agar Masyarakat Peduli Akan Pentingnya Lingkungan

Zahrotul Arofah¹, Anggraeny Puspaningtyas²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.85>

CORRESPONDENCE

E-mail: zahrotularofah2@gmail.com

KEYWORDS

Public Service Standards, Mitigation
Disaster, Flood

ABSTRACT

Mitigation is an effort with a goal to minimize impact of disasters by carrying out proper planning. Geological and hydrometeorological disasters are disasters that are often experienced by Indonesia. In Indonesia hydrometeorological disasters such as floods are affected by strong westerly winds and world climate change. Inappropriate land use change also supports the occurrence of this disaster. The purpose of this study was to determine the standard of flood mitigation services in Karangbinangun Lamongan and to recommend forms of flood disaster mitigation in Karangbinangun Lamongan. This study uses analysis with qualitative research methods. The analysis was carried out with reference to Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management. The results of this study are that there are 14 Public Service Standards for flood disaster mitigation.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana dan sering mengalami dua jenis bencana, yaitu geologi dan Hidrometeorologi. Bencana banjir Hidrometeorologi merupakan bencana yang menimbulkan kerugian fisik dan material terbesar bagi masyarakat akibat perubahan iklim dan pemanfaatan lahan yang tidak tepat oleh para ahli. Keadaan ini menghancurkan adanya tindakan untuk mengatasi bencana banjir (Mardikaningsih et al., 2017). Dalam menghadapi bencana berlangsung, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan berbagai upaya yaitu konstruksi, pembuatan tanggul instruksi evakuasi, pemasangan awal. Sistem peringatan EWS untuk membentuk desa ketahanan terhadap bencana dan sebagainya. Satu desa tahan bencana diciptakan pada Kecamatan Karangbinangun merupakan sebuah desa di dusun Lohgawe desa Gawerejo yang lebih bertujuan untuk mengubah masyarakat mandiri dan siap menghadapi bencana dalam wilayah pedesaan. Untuk bertahan dari bencana upaya harus dilakukan akibat banjir mitigasi bencana banjir sehingga berdampak dampak negatif berupa kerugian dapat dikurangi. Dalam UU Mitigasi Bencana no. 24 tahun 2007 terkait penanggulangan bencana, diartikan sebagai

“lini perusahaan mengurangi risiko bencana baik melalui perkembangan fisik dan kesadaran dan keterampilan mengatasi meningkat risiko bencana” (Umar, 2017).

Menurut Poltak Sinambela (2006:5) Pelayanan Publik diartikan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat (Musleh, 2023; Musleh et al., 2023). Sedangkan Menurut Moenir mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Salles, 2020), Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Menurut Joko (2011:279) Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa mitigasi bencana yaitu upaya penanggulangan bencana agar dapat mengurangi risiko bencana. Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan berkelanjutan (sustainable), yang pada akhirnya diharapkan setiap masyarakat dapat beradaptasi dengan resiko potensi bencana yang ada. Hal ini berarti bahwa kegiatan mitigasi seharusnya sudah dilakukan dalam periode jauh-jauh hari sebelum kejadian bencana, yang seringkali datang lebih cepat dari waktu-waktu yang diperkirakan, dan bahkan memiliki intensitas yang lebih besar dari yang diperkirakan semula. Selain itu, kegiatan mitigasi bencana hendaknya dilakukan melalui pengembangan langkah tindak mitigasi dengan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat setempat, sehingga diharapkan mereka mampu mengorganisir diri mereka sendiri (swakelola) dan mampu mandiri dengan sumber daya yang ada (swadaya) secara lebih optimal (Nugraha et al., 2020).

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (run off) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Muhammad & Aziz, 2020).

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana di Indonesia, pemerintah mengeluarkan pedoman yang di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari Pra bencana seperti mitigasi, kesiapsiagaan, sedangkan

tanggap darurat dengan melaksanakan evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan penampungan, dan kegiatan pasca bencana dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana (Ulum, 2013).

Penanggulangan bencana merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu pada setiap tahapan melalui Badan Penanggulangan Bencana baik yang berada di Pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun yang berada di daerah yang disebut BPBD. BPBD Kabupaten Lamongan dibentuk atas dasar bahwa letak geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Lamongan rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Bencana tersebut disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rangkaian bencana yang dialami kabupaten Lamongan, telah mengembangkan kesadaran dan kepedulian mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana (Salles, 2020).

Kabupaten Lamongan terutama di Dusun Lohgawe Desa Gawerejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan merupakan daerah dataran yang rawan akan bencana banjir. Melihat banyaknya kerugian yang dialami masyarakat setiap tahunnya maka masalah banjir ini harus ditangani dengan serius oleh pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan. Penyelesaian permasalahan banjir tidak bisa diselesaikan hanya merujuk pada disiplin ilmu teknik saja tapi juga partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi, terutama dalam hal operasional dan pemeliharaannya. Salah satu alternatif tindakan yang dapat dilakukan adalah menerapkan konsep perancangan sistem drainase air hujan yang berkelanjutan yaitu suatu sistem resapan air antara lain Sumur Resapan Air Hujan.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis kinerja sistem jaringan drainase yang berbasis pada partisipasi masyarakat, dengan tahapan sebagai berikut: Observasi kondisi existing sistem jaringan drainase adalah Observasi kondisi existing (yang sudah ada) sistem jaringan drainase adalah tahap awal dalam evaluasi dan perencanaan perbaikan atau pengembangan sistem drainase yang lebih baik. Setelah observasi kondisi existing selesai, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana perbaikan atau pengembangan sistem drainase berdasarkan temuan dan masalah yang diidentifikasi. Dalam pengembangan sistem drainase yang lebih baik, penting untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat setempat (Engkus et al., 2021).

Analisis kapasitas sistem jaringan drainase adalah proses penilaian dan perhitungan yang dilakukan untuk menentukan kemampuan suatu sistem drainase dalam menangani debit air yang masuk ke dalamnya. Analisis ini penting dalam merancang, mengelola, atau

meningkatkan sistem drainase agar dapat berfungsi secara efektif dalam mengatasi aliran air hujan atau air permukaan dari berbagai sumber. Analisis kapasitas sistem jaringan drainase merupakan langkah kunci dalam manajemen air permukaan yang efisien dan perlindungan terhadap banjir serta dampak buruk lainnya dari perubahan pola hujan dan penggunaan lahan yang tidak tepat.

Analisis pembuatan Sumur Resapan Air Hujan adalah Analisis pembuatan sumur resapan air hujan adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk merencanakan, merancang, dan membangun sumur resapan sebagai bagian dari sistem manajemen air hujan. Sumur resapan adalah struktur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyaring, dan memasukkan air hujan ke dalam tanah dengan tujuan mengurangi genangan air permukaan, mencegah erosi, dan mengisi kembali akuifer tanah. Analisis pembuatan sumur resapan air hujan adalah langkah penting dalam pengelolaan air hujan yang berkelanjutan dan dapat membantu mengurangi dampak banjir permukaan serta memelihara kualitas air tanah (Pratama & U, 2018).

Wawancara kepada masyarakat guna mengetahui tentang pemahaman fungsi drainase serta kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sistem drainase yang berkelanjutan adalah Wawancara kepada masyarakat salah satu cara yang efektif untuk memahami pemahaman dan kepedulian mereka terhadap fungsi drainase serta pengelolaan sistem drainase yang berkelanjutan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan wawasan langsung dari masyarakat tentang pandangan mereka terhadap peran drainase dalam lingkungan mereka dan apakah mereka telah terlibat dalam upaya pengelolaan yang berkelanjutan. Wawancara dengan masyarakat adalah cara yang efektif untuk mengukur pemahaman mereka tentang drainase dan mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan drainase yang berkelanjutan dalam komunitas (Yesayabela et al., 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ke rawanan terhadap risiko bencana banjir dan bentuk upaya pelayanan dalam penanggulangan mitigasi bencana banjir di Karangbinangun Lamongan, Sehingga perlu mengaitkan data suhu dalam arahan pengelolaan penanggulangan banjir karena berpengaruh juga terhadap evapotranspirasi yang dapat mengurangi durasi genangan banjir.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara mitigasi bencana yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi (Moleong, 2021). Tujuan utama penelitian ini menggunakan kualitatif adalah untuk memahami pelayanan dalam penanggulangan mitigasi bencana banjir dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori, dengan berdasarkan Undang Undang Nomor 25

Tahun 2009 bahwa standar pelayanan publik adalah sebagai berikut: 1) Dasar hukum; 2) Persyaratan; 3) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; 4) Jangka Waktu Penyelesaian; 5) Biaya atau Tarif; 6) Produk Pelayanan; 7) Sarana dan Prasarana; 8) Kompetensi Pelaksana; 9) Pengawasan Internal; 10) Penanganan Pengaduan; 11) Jumlah Pelaksana; 12) Jaminan Pelayanan; 13) Jaminan Keamanan dan Keselamatan; 14) Evaluasi Kinerja Pelaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian lapangan mengenai bentuk upaya dalam pelayanan penanggulangan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Lamongan, data dan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan beberapa informan penelitian. Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa standar pelayanan publik untuk penanganan mitigasi bencana banjir di Karangbinangun Lamongan sebagai berikut :

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sehingga dalam dasar hukum tersebut menimbang bahwa Pemerintah Daerah wajib melindungi segenap warganya atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Persyaratan

Dalam persyaratan pelayanan penanggulangan mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD adalah sebagai berikut: a) Nama atau Identitas; b) Alamat; c) Nomor telepon yang dapat dihubungi; dan d) KTP dan KK (optional).

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Penelitian Pelayanan diberikan kepada masyarakat agar dapat memahami sistem dan mekanisme prosedur sebagai berikut: a) Pemohon informasi datang/via pos ke Sekretariat BPBD untuk mengisi formulir permintaan informasi dengan dilampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi; b) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada pemohon informasi; c) Petugas memproses permintaan informasi sesuai dengan formulir permintaan informasi yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi; d) pemohon/pengguna informasi. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; e) Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi kepada Pengguna Informasi Publik; dan f) Membukukan dan mencatat.

Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pelayanan mitigasi bencana banjir dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah di tingkat nasional, regional, atau lokal. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir: a) Persiapan dan perencanaan: Pada tahap ini, dilakukan identifikasi risiko banjir, penilaian kerentanan wilayah terhadap banjir, dan perencanaan strategi mitigasi.

Analisis data historis banjir, survei topografi, pemetaan wilayah rawan banjir, dan pengembangan rencana darurat adalah beberapa langkah yang dilakukan; b) Konstruksi infrastruktur: Tahap ini melibatkan pembangunan infrastruktur fisik untuk mengurangi risiko banjir, seperti pembangunan tanggul, saluran drainase, waduk, dan pintu air. Proses konstruksi bisa memakan waktu yang cukup lama tergantung pada kompleksitas proyek dan kondisi lapangan; c) Peningkatan kesadaran masyarakat: Pelaksanaan mitigasi bencana banjir juga melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko banjir serta tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapinya. Ini meliputi kampanye penyuluhan, pelatihan, dan latihan evakuasi; d) Sistem peringatan dini: Pendirian atau peningkatan sistem peringatan dini yang efektif merupakan bagian penting dari mitigasi banjir. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi cepat dan akurat tentang kemungkinan terjadinya banjir sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat waktu; e) Monitoring dan pemeliharaan: Setelah infrastruktur mitigasi dibangun, penting untuk melaksanakan pemantauan secara teratur dan pemeliharaan rutin. Ini termasuk pemantauan curah hujan, ketinggian air sungai, dan kondisi infrastruktur untuk mendeteksi potensi kerusakan atau masalah teknis; f) Periode pelaksanaan pelayanan mitigasi bencana banjir dapat mencakup jangka waktu yang panjang, tergantung pada sumber daya yang tersedia, tingkat kepentingan yang diberikan oleh pemerintah, dan kompleksitas situasi banjir di wilayah Karangbinangun Lamongan.

Biaya atau Tarif

Biaya atau tarif pelayanan mitigasi bencana banjir dapat diartikan secara signifikan tergantung pada negara, wilayah, dan jenis layanan yang disediakan. Pada umumnya, biaya atau tarif pelayanan mitigasi bencana banjir meliputi beberapa faktor berikut: a) Pembiayaan infrastruktur: Biaya pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul, saluran drainase, waduk, atau pintu air akan menjadi komponen utama dalam pelayanan mitigasi banjir. Biaya ini dapat mencakup pembebasan lahan, desain dan rekayasa, bahan konstruksi, dan tenaga kerja; b) Operasional dan pemeliharaan: Pelayanan mitigasi banjir juga memerlukan biaya untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Ini meliputi pemantauan, pemeliharaan rutin, perbaikan, dan penggantian komponen yang rusak; c) Sistem peringatan dini: Biaya untuk mengoperasikan dan memelihara sistem peringatan dini banjir, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, dan personel terkait, juga harus dipertimbangkan; d) Pendidikan dan kesadaran masyarakat: Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang banjir serta tindakan mitigasi yang tepat juga dapat memerlukan biaya untuk kampanye penyuluhan, pelatihan, dan aktivitas sosialisasi; e) Penelitian dan pengembangan: Biaya penelitian dan pengembangan dalam bidang mitigasi bencana banjir juga menjadi faktor penting. Ini meliputi penelitian tentang model prediksi banjir, teknologi baru dalam mitigasi banjir, dan evaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah dilaksanakan.

Adapun besaran biaya atau tarif pelayanan mitigasi bencana banjir sangat signifikan dan tergantung pada kompleksitas dan skala program yang dijalankan. Untuk informasi yang lebih spesifik mengenai biaya atau tarif pelayanan mitigasi bencana banjir, disarankan untuk

menghubungi otoritas atau badan yang bertanggung jawab di wilayah atau negara yang bersangkutan.

Produk Pelayanan

Dalam penanggulangan mitigasi bencana banjir, terdapat beberapa produk pelayanan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko banjir dan menghadapi situasi darurat. Beberapa produk pelayanan yang umum digunakan dalam penanggulangan mitigasi bencana banjir antara lain: a) Pemantauan dan peringatan dini: Sistem pemantauan cuaca dan hidrologi yang canggih dapat memberikan informasi tentang kondisi cuaca, curah hujan, tinggi muka air sungai, dan perkiraan banjir. Produk ini membantu dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak berwenang untuk mengambil tindakan pencegahan atau evakuasi; b) Sistem peringatan banjir: Sistem peringatan banjir melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendeteksi dan memprediksi ancaman banjir. Produk ini mencakup sensor air, sistem komunikasi, dan perangkat peringatan yang dapat memberi tahu masyarakat dan pihak berwenang tentang tingkat bahaya banjir; c) Infrastruktur mitigasi banjir: Ini mencakup berbagai infrastruktur fisik yang dirancang untuk mengurangi risiko banjir, seperti tanggul, saluran drainase, waduk, pintu air, dan bangunan penahan air. Produk ini berfungsi untuk mengendalikan aliran air, memperlambat laju aliran, dan membatasi dampak banjir; d) Evakuasi dan tempat perlindungan: Produk ini termasuk perencanaan evakuasi, peta jalur evakuasi, titik kumpul, dan tempat perlindungan sementara bagi penduduk yang terkena banjir. Ini membantu dalam mengkoordinasikan proses evakuasi dan memberikan tempat aman bagi mereka yang terkena dampak banjir; e) Edukasi dan kesadaran masyarakat: Pelayanan ini meliputi kampanye penyuluhan, pelatihan, dan simulasi evakuasi bagi masyarakat. Produk ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko banjir serta memberikan informasi tentang tindakan yang harus diambil dalam menghadapinya.

Selain itu, juga terdapat produk dan layanan lainnya seperti asuransi banjir, bantuan pasca-bencana, dan rehabilitasi pascabanjir yang membantu dalam pemulihan dan rekonstruksi setelah terjadinya banjir. Layanan mitigasi bencana banjir dapat tergantung pada konteks geografis, tingkat kerentanan, dan sumber daya yang tersedia dalam suatu wilayah atau negara.

Sarana dan Prasarana (Fasilitas)

Upaya penanggulangan mitigasi bencana banjir, terdapat beberapa sarana dan prasarana yang penting untuk mengurangi risiko banjir dan menghadapi situasi darurat. Berikut adalah beberapa contoh sarana dan prasarana yang sering digunakan: a) Tanggul dan dinding penahan air: Sarana fisik ini berfungsi untuk mengendalikan aliran air dan membatasi luapan banjir. Tanggul dan dinding penahan air dibangun di sepanjang sungai, pantai, atau wilayah rawan banjir untuk melindungi pemukiman, pertanian, dan infrastruktur kritis; b) Saluran drainase: Saluran drainase seperti parit, selokan, saluran terbuka, atau saluran tertutup dirancang untuk mengalirkan air hujan dengan cepat dan mencegah genangan air di perkotaan atau daerah pemukiman. Saluran drainase yang baik

dapat mengurangi risiko banjir; c) Waduk dan embung: Waduk dan embung adalah struktur penyimpanan air yang dirancang untuk menampung air hujan berlebih saat musim hujan. Mereka membantu mengendalikan aliran air dan mengurangi risiko banjir dengan memperlambat laju aliran dan mengatur aliran air ke hilir; d) Pintu air dan katup pengatur: Pintu air dan katup pengatur digunakan untuk mengontrol aliran air di saluran drainase, sungai, atau kanal. Mereka dapat membuka atau menutup untuk mengatur tinggi muka air dan mengurangi risiko banjir; e) Pompa banjir: Pompa banjir digunakan untuk memindahkan air banjir dari area terendam ke saluran drainase atau sungai terdekat. Pompa banjir membantu mengurangi waktu genangan air dan mempercepat proses pengeringan; f) Jaringan peringatan dini: Jaringan peringatan dini meliputi stasiun pemantau cuaca, stasiun hidrologi, sensor tinggi muka air sungai, dan sistem komunikasi. Mereka digunakan untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini tentang potensi banjir kepada masyarakat dan pihak berwenang; g) Tempat perlindungan sementara: Tempat perlindungan sementara atau tempat evakuasi ditetapkan sebagai tempat aman bagi masyarakat yang terkena dampak banjir. Tempat ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur, makanan, air bersih, dan perlengkapan sanitasi; h) Peta risiko banjir dan sistem informasi geografis (SIG): Peta risiko banjir dan SIG digunakan untuk memetakan wilayah rawan banjir, pola aliran air, dan kerentanan infrastruktur. Informasi ini membantu dalam perencanaan mitigasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penanggulangan banjir. Penting untuk mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana ini secara teratur serta memadukannya dengan pendekatan komprehensif dalam penanggulangan mitigasi bencana banjir.

Kompetensi Pelaksana

Dalam pelayanan penanggulangan mitigasi bencana banjir kompetensi pelaksana melibatkan sejumlah aspek yang penting. Berikut adalah beberapa kompetensi yang diperlukan oleh para pelaksana dalam menanggulangi mitigasi bencana banjir sebagai berikut: a) Pengetahuan tentang Bencana Banjir: Pelaksana pelayanan penanggulangan banjir harus memiliki pemahaman yang kuat tentang banjir, termasuk penyebab, jenis-jenis banjir, siklus hidrologi, pola aliran sungai, serta dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Pengetahuan ini diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan mitigasi yang tepat; b) Pemahaman tentang Sistem Peringatan Dini: Kompetensi yang penting adalah memahami sistem peringatan dini banjir. Pelaksana harus tahu bagaimana menerima, memahami, dan menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat secara efektif. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi seperti sistem peringatan dini berbasis sensor, pemantauan cuaca, dan komunikasi yang efisien; c) Penilaian Risiko dan Perencanaan Mitigasi: Pelaksana harus mampu melakukan penilaian risiko banjir di wilayah yang terdampak. Mereka perlu mengumpulkan data terkait geografi, hidrologi, dan sosial-ekonomi wilayah tersebut untuk menentukan tingkat risiko banjir dan dampaknya. Berdasarkan penilaian ini, pelaksana dapat merancang rencana mitigasi yang efektif, termasuk infrastruktur drainase, tanggul, dan relokasi penduduk jika diperlukan; d) Koordinasi dan Manajemen Krisis: Dalam situasi bencana banjir, pelaksana harus mampu bekerja secara efektif dalam koordinasi dengan pihak

terkait, seperti tim penanggulangan bencana, kepolisian, pemadam kebakaran, dan pihak medis. Mereka harus memiliki keterampilan manajemen krisis untuk mengkoordinasikan upaya penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan; e) Keterampilan Komunikasi: Kompetensi dalam komunikasi yang efektif sangat penting. Pelaksana harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan dengan empati kepada masyarakat yang terdampak banjir. Mereka juga harus mampu mengkomunikasikan informasi tentang bahaya banjir, langkah-langkah mitigasi, dan tindakan penyelamatan dengan jelas kepada semua pihak terkait; f) Keterampilan Teknis: Pelaksana pelayanan penanggulangan banjir harus memiliki keterampilan teknis dalam mengoperasikan peralatan seperti pompa air, perahu karet, dan peralatan keselamatan pribadi. Mereka juga harus mampu melakukan pemantauan sungai, evaluasi infrastruktur, dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh banjir; dan g) Pengetahuan Hukum dan Regulasi: Pelaksana harus memahami kerangka hukum dan regulasi yang terkait.

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dalam pelayanan penanggulangan dan mitigasi bencana banjir di Karangbinangun Kabupaten Lamongan melibatkan sejumlah langkah dan proses yang penting. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan internal yang dapat dilakukan: a) Pembentukan Tim Pengawas: Dalam pelayanan penanggulangan bencana banjir, penting untuk membentuk tim pengawas internal yang terdiri dari anggota yang kompeten dan terlatih. Tim ini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan penanggulangan banjir dan mitigasi di wilayah Karangbinangun Lamongan; b) Penetapan Standar Operasional: Tim pengawas internal perlu menetapkan standar operasional yang jelas dan terukur dalam penanggulangan banjir. Standar ini mencakup prosedur pengawasan, tindakan mitigasi yang harus dilakukan, dan indikator kinerja untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan; c) Pengumpulan dan Analisis Data: Tim pengawas internal harus secara teratur mengumpulkan data terkait kegiatan penanggulangan banjir di Karangbinangun Lamongan. Data ini meliputi informasi tentang peringatan dini, pemantauan sungai, evakuasi, dan tindakan mitigasi lainnya. Selanjutnya, data tersebut harus dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan; d) Inspeksi dan Audit: Tim pengawas internal dapat melakukan inspeksi dan audit terhadap infrastruktur penanggulangan banjir, seperti tanggul, saluran drainase, dan pompa air. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut dalam kondisi baik dan siap digunakan saat terjadi banjir. Selain itu, audit juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dan sumber daya yang telah dialokasikan untuk penanggulangan banjir; e) Pelaporan dan Evaluasi: Tim pengawas internal harus menyusun laporan rutin tentang hasil pengawasan yang dilakukan. Laporan ini harus mencakup temuan, rekomendasi perbaikan, serta langkah-langkah yang telah diambil dalam penanggulangan banjir. Selain itu, evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas upaya mitigasi yang telah dilakukan; f) Partisipasi Masyarakat: Pengawasan internal juga dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proses penanggulangan banjir. Masyarakat dapat melaporkan masalah, memberikan masukan, dan mengajukan saran untuk perbaikan sistem penanggulangan banjir; dan g)

Pengawasan internal yang efektif akan membantu memastikan bahwa pelayanan penanggulangan dan mitigasi bencana banjir di Karangbinangun Lamongan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Penanganan Pengaduan

Untuk menangani pengaduan masyarakat yang terkena dampak banjir di Karangbinangun, Lamongan, langkah-langkah berikut dapat diikuti: a) Membentuk Tim Pengaduan: Bentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk menangani pengaduan masyarakat terkait dampak banjir. Tim ini harus terdiri dari anggota yang kompeten dan siap untuk memberikan respons yang cepat dan efektif; b) Membuka Saluran Pengaduan: Pastikan terdapat saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat yang terkena dampak banjir. Saluran ini dapat berupa hotline, email, formulir online, atau kantor pelayanan bencana. Pastikan informasi mengenai saluran pengaduan ini diperbarui dan mudah diakses oleh masyarakat; c) Menerima dan Merekam Pengaduan: Tim pengaduan harus siap untuk menerima dan merekam setiap pengaduan yang masuk. Pastikan ada sistem pencatatan yang baik untuk memastikan bahwa setiap pengaduan terdokumentasi dengan jelas dan lengkap. Informasi yang penting dalam pencatatan pengaduan meliputi nama pelapor, kontak yang bisa dihubungi, lokasi, jenis dampak yang dialami, dan keterangan lengkap mengenai pengaduan tersebut; d) Evaluasi dan Prioritasi: Setelah pengaduan diterima, tim pengaduan harus melakukan evaluasi dan prioritas berdasarkan urgensi dan tingkat dampak yang dialami oleh masyarakat. Penting untuk memberikan perhatian lebih pada pengaduan yang mengindikasikan ancaman terhadap keselamatan atau kebutuhan mendesak; e) Tanggapan dan Koordinasi: Tim pengaduan harus memberikan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap setiap pengaduan. Koordinasikan dengan tim penanggulangan bencana dan pihak terkait lainnya untuk menyediakan bantuan dan bimbingan yang diperlukan bagi masyarakat yang terkena dampak banjir; f) Tindak Lanjut dan Pemantauan: Pastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti dan dipantau untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan atau bantuan telah diberikan. Tim pengaduan harus memastikan komunikasi yang terus-menerus dengan pelapor untuk memberikan update mengenai tindakan yang diambil; g) Umpan Balik dan Evaluasi: Setelah penanganan pengaduan selesai, mintalah umpan balik dari masyarakat mengenai proses penanganan pengaduan. Evaluasi secara berkala mengenai efektivitas tim pengaduan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan sistem penanganan pengaduan di masa mendatang; dan h) Penting untuk menjaga transparansi, responsif, dan komunikasi yang efektif dalam menangani pengaduan masyarakat yang terkena dampak banjir. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Jumlah Pelaksana

Pelaksana BPBD menurut Peraturan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2009 meliputi berikut: a) Kepala Pelaksana; b) Sekretariat membawahi; c) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan membawahi; d) Bidang kedaruratan dan logistik membawahi; e) Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi membawahi; dan f) Kelompok jabatan fungsional.

Jaminan Pelayanan

Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima bantuan pelayanan penanganan mitigasi bencana banjir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan tersebut berupa paket dana siap pakai (DSP) dan paket bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (PKD). Penyaluran bantuan tersebut adalah sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat di Dusun Lohgawe Desa Gawerejo Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang terdampak bencana. BNPB Juga telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Lamongan agar selalu siap membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir (Nugraha et al., 2020) .

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang terkena dampak banjir merupakan prioritas utama dalam penanggulangan bencana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memberikan jaminan tersebut: a) Evakuasi dan Penyelamatan: Ketika banjir terjadi, langkah pertama adalah melakukan evakuasi yang aman bagi masyarakat yang terkena dampak. Tim penanggulangan bencana dan petugas terkait harus segera memberikan instruksi evakuasi kepada masyarakat, mengarahkan mereka ke tempat yang lebih tinggi atau lokasi evakuasi yang telah ditentukan. Upaya penyelamatan juga harus dilakukan dengan segera untuk membantu mereka yang terjebak atau membutuhkan pertolongan; b) Sistem Peringatan Dini: Penting untuk memiliki sistem peringatan dini yang efektif untuk memastikan masyarakat dapat menerima informasi tentang bahaya banjir dengan cepat. Sistem peringatan dini yang mencakup pemberitahuan melalui sirene, pesan teks, pengumuman radio, atau media lainnya harus didirikan dan dioperasikan secara baik. Masyarakat harus diberikan informasi jelas mengenai tindakan yang harus diambil saat menerima peringatan banjir; c) Pengungsian dan Tempat Penampungan: Masyarakat yang dievakuasi harus ditempatkan di tempat pengungsian yang aman dan nyaman. Tempat penampungan harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti air bersih, sanitasi yang baik, pelayanan kesehatan, makanan, dan perlindungan yang memadai. Upaya harus dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di tempat-tempat pengungsian guna mencegah penyakit dan masalah kesehatan lainnya; d) Pelayanan Kesehatan Darurat: Dalam situasi banjir, pelayanan kesehatan darurat harus tersedia dan siap tanggap. Tim medis dan tenaga kesehatan harus dikerahkan ke daerah yang terkena dampak banjir untuk memberikan perawatan medis, mengidentifikasi dan mengobati penyakit yang terkait dengan banjir, serta memberikan imunisasi dan pengobatan yang diperlukan; e) Bantuan Pangan dan Air Bersih: Pastikan pasokan makanan dan air bersih tersedia bagi masyarakat yang terkena dampak banjir. Distribusi bantuan pangan dan air bersih harus dilakukan secara teratur dan merata, dengan memperhatikan kebutuhan khusus seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia; f) Pengamanan dan Patroli: Upaya pengamanan dan patroli perlu dilakukan untuk menjaga keamanan di daerah yang terkena dampak banjir. Ini termasuk mencegah akses ke daerah yang berbahaya, mengawasi dan melindungi properti yang ditinggalkan, serta menghindari tindakan kriminal atau penjarahan; g) Komunikasi dan

Edukasi: Penting untuk terus memberikan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait risiko banjir, tindakan pengamanan, dan upaya pemulihan.

Evaluasi Kinerja Pegawai

Menerapkan evaluasi kinerja pelaksana dalam mengatasi dampak bencana banjir adalah langkah penting untuk memperbaiki dan memperkuat upaya penanggulangan banjir di masa depan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan: a) Menetapkan Indikator Kinerja: Tentukan indikator kinerja yang spesifik dan terukur untuk mengevaluasi upaya penanggulangan banjir. Indikator tersebut dapat meliputi waktu respons, efektivitas evakuasi, jumlah korban, tingkat kerusakan infrastruktur, atau penggunaan sumber daya; b) Pengumpulan Data: Kumpulkan data yang relevan selama penanganan bencana banjir. Data ini mencakup informasi mengenai tindakan yang dilakukan, waktu pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan hasil yang dicapai. Pastikan data dikumpulkan secara sistematis dan akurat untuk mendukung proses evaluasi; c) Analisis Kinerja: Lakukan analisis kinerja dengan membandingkan data yang terkumpul dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam upaya penanggulangan banjir serta identifikasi peluang untuk perbaikan di masa depan; d) Evaluasi Respons: Tinjau respons dan tindakan yang diambil selama penanggulangan banjir. Evaluasi apakah tindakan yang diambil sesuai dengan rencana penanggulangan bencana, apakah respons tepat waktu, dan apakah tindakan tersebut efektif dalam mengurangi dampak banjir; e) Evaluasi Koordinasi: Tinjau koordinasi antara tim penanggulangan bencana, pemerintah daerah, relawan, dan instansi terkait lainnya. Evaluasi apakah komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik, apakah informasi disampaikan dengan efektif, dan apakah terdapat sinergi dalam tindakan penanggulangan banjir; f) Melibatkan Stakeholder: Libatkan stakeholder terkait, termasuk masyarakat yang terkena dampak banjir, dalam proses evaluasi. Dapatkan masukan dan umpan balik dari mereka mengenai keberhasilan dan kekurangan dalam penanganan banjir. Ini akan membantu mendapatkan sudut pandang yang komprehensif dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana; g) Perbaikan dan Pembaharuan: Berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pembaharuan. Buat rekomendasi untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi dan tingkatkan kapasitas serta persiapan dalam menghadapi banjir di masa mendatang. Implementasikan langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja pelaksana; dan h) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Lanjutkan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap penanganan banjir. Perbarui indikator kinerja sesuai kebutuhan dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas langkah-langkah perbaikan.

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Penanggulangan Bencana dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dan upaya dalam mengurangi risiko bencana banjir dan kekeringan secara struktural maupun non-struktural sudah sampai pada Dusun Lohgawe Desa Gawerejo Karangbinangun lamongan. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi dalam upaya mitigasi bencana

banjir. Dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir, BPBD bekerjasama dengan dinas PU, dinas pertanian, dinas Kesehatan yang mempunyai kewenangan dalam penanggulangan bencana. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Dusun Lohgawe Desa Gawerejo Kecamatan Karangbinangun, BPBD Kabupaten Lamongan masih menemukan beberapa hambatan seperti akses jalan ke Dusun Lohgawe Desa Gawerejo Karangbinangun yang sulit dilewati oleh kendaraan besar, ego sektoral dari masing-masing dinas yang mempunyai kewenangan teknis, dan faktor alam lainnya.

REFERENSI

- Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan, Alliadzar Hanif, & Anisa Tiara Fitr. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39–46. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Mardikaningsih, S. M., Muryani, C., & Nugraha, S. (2017). Studi Kerentanan dan Arah Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016. *Jurnal Geo Eco*, 3(2), 157–163.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52–61. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235>
- Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42–50. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.6853.42-50>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental: Collaborative Governance of A Pilgrimage Tourism, Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1).
- Nugraha, S. N., Setiawan, A., Agningsih, D. P., Aprilianti, D. N., Sutisna, E., & Yuliani, L. (2020). Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(9), 49–59.
- Pratama, R., & U, I. (2018). Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Buana*, 3(3), 451–465.
- Salles, O. F. (2020). Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado (Studi Di Kecamatan Paal 2). *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Ulum, M. C. (2013). Governance Dan Capacity Building Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Indonesia. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 4(2), 69–76.
- Umar, Z. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1–13.
- Yesayabela, T. M., Prasetio, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111–118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>